

▶ STANDARDISASI TOL

BPJT Pacu Audit Pelayanan 24 Tol

JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol mempercepat audit standar pelayanan minimum semester I/2013 terhadap 24 ruas jalan tol yang sudah beroperasi yang berlangsung hingga Agustus mendatang.

Dimas Novita Sari, Oktaviana DB Hans,
Ashari Purwo
redaksi@bisnis.id

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan pihaknya segera merampungkan audit seluruh operator jalan tol. "Operator tol yang berada di wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar sudah melaporkan kondisi standar pelayanan minimum (SPM)-nya. Namun, kami belum selesai menilai kondisi seluruh tol," ujarnya, Kamis (20/6).

Berdasarkan laporan SPM ter-

▶ Audit lapangan berlangsung Juli-Agustus.

▶ Pembangunan fisik ruas tol Gempol-Porong mencapai 30%.

▶ PT Jasa Marga Bali Tol memfinalisasi skema tarif.

sebut, BPJT juga akan melakukan evaluasi dan verifikasi dengan kondisi di lapangan, yang berlangsung antara Juli-Agustus sebelum penilaian SPM seluruh jalan tol diumumkan.

Adapun untuk audit SPM ruas tol semester II/2012, papar Gani, semua ruas jalan tol telah dinyatakan memenuhi standar yang ditentukan, kecuali tol Kanci-Pejagan. Sebelumnya sebanyak 10 ruas tol diminta memperbaiki SPM akibat masih adanya temuan jalan berlubang, pagar yang hilang, minimnya penerangan, dan terbatasnya rambu lalu lintas.

Kesepuluh ruas tol itu antara lain ruas jalan tol Cawang-Tomang-Cengkareng, tol Jakarta Cikampek, tol Jakarta Outer Ring Road, tol Ulu-Jami-Pondok Aren, dan tol Sedyatno. Selain itu, adalah tol Cipularang-Padaleunyi, ruas jalan tol Kanci-Pejagan, ruas jalan tol Surabaya-Gresik, ruas jalan tol Waru-Juanda, dan ruas jalan tol Bogor Ring Road.

Gani menuturkan PT MNC

Infrastruktur Utama selaku pemegang ruas tol Kanci-Pejagan, meminta tambahan waktu untuk memperbaiki cidera janji hingga 6 bulan ke depan.

"Ada yang belum selesai dari waktu yang diberikan sebelumnya sehingga minta perpanjangan waktu 6 bulan lagi," katanya.

Kendati demikian, pihaknya, lanjut Gani, tidak akan serta merta memberikan waktu tersebut. BPJT memberikan waktu hingga H-10 Lebaran kepada operator untuk memperbaiki ruas jalan tol tersebut mengingat ruas tersebut merupakan jalur mudik.

Selain Kanci-Pejagan, BPJT juga meminta PT Jasa Marga Tbk untuk segera memperbaiki kerusakan di tol Cipularang. Perbaikan diminta harus diselesaikan sebelum Ramadan. "Kerusakan di KM 47 tol Jakarta-Cikampek harus diperbaiki secara permanen, karena terjadi *sliding* di kedalaman 8-12 meter."

Pemerintah, lanjutnya, bisa memberikan sanksi apabila perbaikan jalan tol tidak dilakukan, meski peringatan sudah diberikan. Jika kerusakan tersebut tetap ada, pemerintah akan menugaskan pihak lain untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Namun, biaya perbaikan jalan akan dibebankan ke operator.

Adapun sanksi lainnya pemerintah memiliki wewenang untuk menggratiskan bahkan menutup

jalan tol bila dinilai membahayakan. Operator jalan tol juga diminta selalu melaporkan SPM setiap 6 bulan sekali guna memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pemenuhan SPM tersebut sebagai syarat untuk menaikan tarif jalan tol tiap 2 tahun sekali sesuai Undang-Undang Jalan berdasarkan kenaikan tingkat inflasi di daerah.

PROGRES TOL

Dalam perkembangan lain, pembangunan fisik ruas jalan tol Gempol-Porong paket III sudah mencapai 30%.

Pembangunan proyek Rp1,5 triliun tersebut dibagi menjadi paket I sepanjang 5,1 km, paket II 2,3 km, dan paket III 3,7 km.

Pembangunan dimulai dari paket III yakni dari Sejapanan-Gempol karena ruas tersebut terkoneksi dengan proyek tol Gempol-Pandaan dan proyek Gempol-Pasuruan, yang saat ini pembangunannya sedang dikerjakan. "Dimulai dari paket III, konstruksinya sudah 30%. Diharapkan dapat selesai bersamaan dengan dua ruas ini sehingga dapat berfungsi optimal," kata Pimpinan Proyek ruas jalan tol Gempol-Porong Mulyono, Kamis (20/6).

Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Soenarso mengatakan dalam APBN-P 2013 yang disahkan dalam rapat paripurna

DPR RI, BPLS mengalami pemangkasan anggaran untuk penghematan bagi kompensasi BBM.

Anggaran BPLS dipangkas sebesar Rp205 miliar dari total Rp2,256 triliun dalam APBN 2013. Pengurangan ini meliputi anggaran mitigasi sebesar Rp20 miliar dari sebelumnya senilai Rp155 miliar.

Dana yang dialokasikan dalam APBN 2013 ditujukan bagi penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan penanganan mitigasi semburan lumpur guna melindungi infrastruktur yang masih layak digunakan.

Sementara itu, PT Jasa Marga Bali Tol memfinalisasi skema penetapan tarif atas penggunaan jalan tol di atas perairan Bali menyusul selesainya pembangunan konstruksi jalan sepanjang 12 km itu.

Akhmad Tito Karim, Dirut Jasa Marga Bali Tol, mengatakan skema tarif yang disusun berdasarkan *business plan* dari perseroan pengembang akan ditetapkan dan diumumkan ke publik pada saat peresmian, akhir Juli 2013.

Skema itu, lanjut Akhmad, akan diputus oleh Kemenhub menyertai surat mulai beroperasinya jalan tol di atas perairan Bali itu. "Namun pada usulan tarif dari perseroan, untuk kelas I atau mobil sedan sebesar Rp10.000. Adapun untuk sepeda motor dikenakan sebesar Rp4.000," katanya, Kamis (20/6). ■